

## Izin Dicabut, Keadilan Belum Tertu Datang .....

Dari Halaman 1

kan tanpa ujung. Izin dicabut. Nama perusahaan disebut.

Negara memang tampak hadir. Namun bagi warga terdampak, tentu pertanyaan besarnya tidak berhenti di situ saja.

Karena banjir di Sumatera bukan hanya menenggelamkan harta benda. Ia merenggut nyawa. Ia memaksa ribuan orang meninggalkan rumah. Banyak rumah yang kini tak lagi layak ditempati. Kendaraan rusak. Ladang hancur. Sumber penghidupan hilang. Kerugian mereka tidak kecil. Tidak sementara. Dan tidak mudah dipulihkan.

Di titik ini, pencabutan izin usaha baru menjawab satu hal yakni penghentian aktivitas. Ia belum menjawab soal keadilan.

Karena keadilan bagi korban tidak hanya soal perusahaan berhenti beroperasi. Keadilan adalah soal tanggung jawab. Soal ganti rugi. Soal pemulihan. Soal siapa yang menanggung kerugian

yang nilainya tak pernah benar-benar dihitung negara.

Publik belum mendengar apakah pencabutan izin ini akan diikuti langkah hukum. Apakah akan ada proses pidana. Apakah akan ada gugatan perdata. Apakah perusahaan-perusahaan itu akan dimintai mengganti rumah warga. Mengembalikan lahan yang rusak. Atau sekadar pergi tanpa menoleh ke belakang.

Di sinilah ujian sesungguhnya dimulai.

Tanpa proses hukum, pencabutan izin berisiko menjadi hukuman administratif semata. Terlihat tegas, tapi minim efek jera. Perusahaan bisa berhenti. Berganti nama. Berganti badan hukum. Lalu muncul kembali di tempat lain. Dengan pola yang sama.

Padahal kejahatan lingkungan bukan sekadar pelanggaran izin. Ia adalah kejahatan terhadap kehidupan. Terhadap manusia. Terhadap makhluk lain yang berbagi ruang hidup yang sama.

Jika negara sungguh ingin adil, maka hukum pidana harus berjalan. Bukan hanya pada in-

stitusi, tapi juga pada orang-orang di baliknya. Agar tidak ada lagi yang bersembunyi di balik papan nama perusahaan. Agar keputusan bisnis yang merusak lingkungan memiliki konsekuensi personal.

Di saat yang sama, hukum perdata juga harus ditegakkan. Ganti rugi bukan belas kasihan. Ia adalah hak korban. Warga tidak bisa dibiar menanggung sendiri kerugian dari keuntungan yang dinikmati segelintir pihak selama bertahun-hamen.

Pencabutan izin adalah awal. Bukan akhir.

Jika langkah ini berhenti di sini, maka keadilan hanya akan menjadi simbol. Tampak dari jauh, tapi tak pernah benar-benar sampai ke rumah warga yang masih berlumur lumpur.

Dan bagi rakyat yang kehilangan segalanya, keadilan tidak diukur dari berapa izin yang dicabut. Tapi dari apakah hidup mereka benar-benar dipulihkan.

Di sinilah ujian sesungguhnya berdiri.

Tidak setengah jalan. Tidak ragu.

Dan tidak berhenti pada formalitas.

## FKMPP Desak Prabowo Evaluasi Kepala BGN .....

Dari Halaman 1

FKMPP Bachtiar SH, persoalan keracunan yang dialami siswa penerima program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sudah kerap terjadi, dan teranyar dialami 385 siswa SDN dan SMA.

"Melihat seringnya terjadi siswa keracunan usai mencicipi menu MBG, seharusnya pemerintah mengambil sikap tegas. Tutup SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dan Dapur-dapur MBG yang diduga memproduksi makanan beracun," ungkap Bachtiar.

Ia juga menilai, seringnya terdengar kasus siswa keracunan dikarenakan lemahnya pengawasan oleh lembaga BGN yang dinakhodai Dadan Hindayana.

"Jadi kami menilai kinerja Kepala BGN kurang memuaskan, sehingga menimbulkan banyak permasalahan di lapangan. Untuk itu FKMPP meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Kepala BGN. Jangan sampai program yang tujuan untuk mencerdaskan siswa malah yang terjadi sebaliknya (membinasakan)," desak Bachtiar.

### Dugaan Korupsi

Bachtiar juga menyatakan, telah terjadi dugaan korupsi dalam proses produksi pengadaan menu MBG, sehingga seringnya muncul persoalan keracunan.

Untuk itu, ia juga mendesak aparat penegak hukum agar turun tangan menyelidiki penggunaan anggaran program MBG yang menghabiskan dana Rp335 triliun untuk tahun 2026.

"Kita juga mendesak APH juga melakukan pengawasan dan menyelidiki aliran dana ke SPPG maupun Dapur-dapur MBG, apakah ada praktik-praktik korupsi yang terjadi, seperti membeli bahan baku yang sudah kadaluarsa untuk memperoleh keuntungan yang besar," sebut Bachtiar.

### 385 Siswa Keracunan

Seperti diberitakan, sejumlah siswa SDN dan SMA di Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, mengaku mengalami muntah dan diare akhir pekan lalu.

Salah seorang wali murid SMAN 2 Mojokerto mengatakan, anaknya mengalami diare dan muntah-muntah sejak Jumat (16/1). Kondisi itu berlangsung selama tiga hari hingga Minggu (18/1).

Menurutnya, gejala serupa turut dialami banyak siswa lainnya. "Di grup WA banyak yang bilang juga diare, tidak satu anak saja," ungkapnya.

Hingga Senin (19/1), terdapat siswa yang belum masuk sekolah. Menurutnya, ada puluhan siswa yang kini masih menjalani perawatan di fasilitas layanan kesehatan.

"Kalau anak saya sudah masuk sekolah lagi, minum obat sendiri di rumah," tandas dia.

Informasi yang dihimpun, dugaan keracunan MBG juga dialami sejumlah siswa di SDN Wates

5 hingga SDN Wates 6. MBG tersebut disalurkan SPPG Wates.

Sesuai informasi di akun medsos SPPG, menu MBG pada Kamis (15/1) berupa nasi putih, tumis sawi wortel, tahu tempe balado, ayam goreng unggul, dan kelengkeng.

Jumlah porsi hari itu mencapai 3.997 porsi untuk 20 kelompok penerima meliputi lembaga sekolah dan posyandu.

Sementara itu, Satgas MBG Wates Didik membenarkan adanya insiden tersebut. Kendati demikian, ia belum bisa memastikan jika keracunan yang dialami anak-anak itu disebabkan oleh menu MBG yang disantap.

"Belum bisa memastikan apakah dari menu MBG, karena kita nyuplai-nya dari Kamis (15/1), tapi anak-anak keluhan mulai Sabtu (17/1) sore," ungkapnya.

Pihaknya menyatakan, dugaan sementara anak-anak mengonsumsi susu kemasan yang disuplai oleh SPPG. "Dugaan sementara karena susunya, tapi imun anak-anak juga mempengaruhi," ulasnya.

Meski insiden tersebut terjadi, pihaknya menutup pengiriman MBG masih tetap berjalan seperti biasa di sekolah-sekolah.

"Cuma untuk menu kita ganti dengan menu kering dulu sementara waktu, untuk antisipasi," tandasnya. Hingga berita ini ditulis, Kepala Dinkes PPKB Kota Mojokerto Achmad Rheza belum bisa dikonfirmasi. (A-10)

## Mantan Kadis Pertanian Palas Ditetapkan Tersangka .....

Dari Halaman 1

pidana korupsi penyalahgunaan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada Koperasi Produsen Persahabatan Jaya Mandiri Tahun Anggaran 2023.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan usai ekspos perkara yang digelar di Kantor Kejari Padang Lawas pada Rabu (21/1/2026). Berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap kedua tersangka untuk proses hukum lebih lanjut.

Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, yaitu MH (Pendiri dan Ketua Koperasi Produsen Persahabatan Jaya Mandiri) yang diduga sebagai aktor utama dalam manipulasi penyaluran dana, dan FA (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas TA 2023) yang diduga terlibat dalam kapasitasnya sebagai otoritas pemerintah daerah yang mengawasi program tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas

melalui tim penyidik menyatakan bahwa penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-01/L.2.36/Fd.1/01/2026 untuk M.H. dan PRINT-02/L.2.36/Fd.1/01/2026 untuk F.A.

### Modus Operandi dan Kerugian Negara

Kasus ini bermula dari alokasi anggaran program PSR Tahun 2023 di Kabupaten Padang Lawas senilai Rp. 3.342.150.000. Dana tersebut bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang disalurkan melalui rekening escrow koperasi.

Hasil audit independen mengungkapkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.275.280.203. Kerugian ini muncul akibat pemberian fasilitas dana PSR kepada 45 orang yang terbukti bukan merupakan anggota resmi Koperasi Produsen Persahabatan Jaya Mandiri. Tim ahli menggunakan metode total loss dalam menghitung penyimpangan dana pada kelompok tersebut.

### Penyalaman Aset Negara

Dalam konferensi pers tersebut, Kejari

Padang Lawas juga memamerkan uang tunai miliaran rupiah hasil penyitaan sebagai upaya pemulihkan kerugian negara. Total uang yang berhasil disita mencapai Rp. 1.853.854.462, yang terdiri dari:

Rp1.753.832.382 dari rekening escrow koperasi di BRI, Rp. 100.022.080 dari pengembalian kelebihan bayar oleh rekanan (CV Pagadid Rokan Mandiri) yang sebelumnya sempat digunakan oleh tersangka M.H. untuk kepentingan pribadi.

### Jeratan Hukum

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 603 atau Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

"Saat ini tim penyidik tengah melakukan pemberkasan untuk segera dilimpahkan ke Penuntut Umum agar perkara ini dapat segera disidangkan," ujar perwakilan tim penyidik di hadapan awak media. (A-10)

## Perusahaan Biang Kerok Bencana Sumatera Digugat .....

Dari Halaman 1

Pdt.Sus-LH/2026/PN Jkt.Pst.

"Klasifikasi perkara: Hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan," dilansir dari laman SIPPN Jakarta Pusat, Kamis (22/1).

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara PN Jakarta Pusat Sunoto membenarkan gugatan tersebut. Perkara itu akan diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari Saptono selaku ketua dengan anggota yaitu Ida Satriani dan Dwi Elyarhma Sulistyowati.

Sidang perdana akan dimulai pada Selasa, 3 Februari 2026.

Berikut petum lengkap KLH/BPLH:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak (strict liability);

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh harta benda milik Tergugat;

c. Kerugian Ekonomi Lingkungan sebesar Rp1.280.000.000

d. Peningkatan Sedimentasi sebesar Rp175.549.263

e. Penghitungan Run-Off sebesar Rp4.799.309.140

PT MST merupakan satu dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut beberapa waktu lalu imbas dari bencana di Pulau Sumatra.

Adapun berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Selatan dilaporkan sedikitnya 1.660 unit rumah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan menewaskan 85 orang.

Keadaan tersebut sesuai data rekapitulasi laporan sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) wilayah itu per 5 Desember 2025.

Tercatat korban yang belum ditemukan atau hilang sebanyak 31 orang, luka berat 30 orang, dan luka ringan 39 orang. Keluarga yang terdampak mencapai 2.800 Kepala Keluarga (KK) atau 17.062 jiwa. (cnni/js)

## KPK Geledah Rumah Wali Kota Madiun dan Kepala .....

Dari Halaman 1

PUPR Kota Madiun, Thariq Megah, Jalan Tanjung Manis, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, pada hari ini, Kamis (22/1).

Di lokasi pertama atau rumah pribadi Madi, penyidik membawa satu koper berwarna gelap, lalu dimasukkan ke dalam bagasi salah satu mobil Toyota Innova hitam.

Menurut warga setempat Anung Silowadono, rombongan penyidik KPK yang menaiki enam mobil, sudah tiba di rumah Madi sekira jam 14.30 WIB. Mereka baru keluar dari rumah itu sekitar pukul 20.45 WIB.

"Tidak tahu bawa barang apa. Tidak tahu

rombongan dari mana. Saya lewat ramai sekali," ujar Anung.

Sementara di lokasi kedua, penyidik KPK menyerah kediaman Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thariq Megah di Jalan Tanjung Manis, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

Sejumlah kendaraan Toyota Innova berwarna hitam yang identik dengan lembaga antirasuah itu terlihat terparkir di jalan depan rumah Thariq.

Pengeledahan masih berlangsung, pagar rumah setinggi dua meter tertutup rapat. Hal itu menyita perhatian tetangga dan warga sekitar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pihaknya telah mengeledah kediaman Wali Kota Madiun Madi dan orang keper-

cayaannya bernama Rochim Ruhdiyanto. Mereka mengaku menyita sejumlah barang bukti diduga terkait kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

"Di Madiun, pada Rabu (21/1), Penyidik melakukan pengeledahan di rumah MD [Madi] dan RR [Rochim Ruhdiyanto]. Dari pengeledahan yang berlangsung hingga malam hari tersebut, penyidik mengamankan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik. Selain itu, penyidik juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (22/1). (cnni/js)

## 28 Perusahaan Perusak ...

Dari Halaman 1

Dari total perizinan yang dicabut, sebanyak 22 perusahaan masuk dalam kategori perusahaan berusaha permanen hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektare.

Sementara itu, sebanyak 6 perusahaan masuk dalam kategori perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPH).